

# PARADIGMA *RATIONAL CHOICE* DALAM MENELAAH FENOMENA GOLPUT DAN PERILAKU PEMILIH DI INDONESIA

Syah Firdaus

Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Kampus No.1 Grendeng Purwokerto  
firdausunsoed@yahoo.co.id

## Abstrak

Pasca reformasi seiring gelora demokratisasi digelar, geliat golput juga semakin meningkat. Asumsi golput yang paling gampang dari jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya. Namun asumsi tersebut masih bisa diperdebatkan, pemilih terdaftar yang tidak menggunakan haknya tidak bisa serta merta dikelompokkan sebagai golput. Golput hanyalah mereka yang memang sengaja tidak mau menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara atau sengaja merusak suaranya. Dalam pembahasan tulisan ini, dengan pendekatan konsep *rational choice* untuk menelaah golput, adalah keputusan rasional untuk memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara preferensi kelompok elit politik dengan publiknya di bawah. Fenomena golput semestinya dianggap sebagai bagian dari koreksi dan kritikan sosial baik secara politis maupun administratif. Pilihan untuk menekan golput berada di tangan para elit dengan kesadaran mereka untuk mendeteksi bagaimana menekan persentase angka golput setiap kali pemilu digelar .

**Kata Kunci:** Golput, Perilaku Pemilih, dan Pemilu

## Abstract

*After the surge of democratization reforms as laid out, stretching golput also increased. Golput the easy assumption of the number of registered voters who did not exercise their voting rights. However, this assumption is debatable, registered voters who did not exercise its right can not necessarily be classified as non-voters. Golput are those who deliberately do not want to vote on polling day or deliberately damaging her voice. In the discussion paper, the concept of rational choice approach to examine abstentions, was a rational decision to show the discrepancy between the preferences of the political elite to the public below. The phenomenon of non-voters should be considered as part of the correction and social criticism both politically and administratively. Option to suppress non-voters in the hands of the elites with their awareness to detect the percentage of non-voters to pressure each time the election was held.*

**Keywords:** *Golput, Voter Behavior and Elections*

Ketika menggelorakan kata reformasi, rakyat Indonesia menyatakan diri untuk berkomitmen memasuki era baru bernama “demokratisasi”, mereka berupaya melampiasakan euphoria “kemerdekaan” dari belenggu otoritarian kekuasaan politik pemerintahan Orde Baru. Dengan membebaskan diri untuk berekspresi, menyatakan pendapat, serta melakukan partisipasi

politik sesuai hati nurani mereka. Namun partisipasi atau kebebasan politik rakyat Indonesia diuji melalui pemilihan umum (pemilu), sebagai salah satu konsep dasar demokrasi.

Pasca reformasi, pergelaran pemilu 1999 dianggap berkualitas dan demokratis, bahkan sejajar dengan pergelaran pemilu 1955 ketika menentukan pilihan untuk

membentuk pemerintahan Indonesia pertama kalinya. Setelah 15 tahun reformasi bergulir, pergelaran pemilu tidak hanya memilih anggota legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, namun pemilu di tingkat lokal (pemilihan kepala daerah/pilkada) untuk memilih gubernur, walikota atau bupati sudah beberapa kali digelar, bahkan terakhir bagi warga Jawa Barat untuk memilih gubernur kemudian masyarakat Banyumas untuk memilih bupati sudah dilaksanakan. Serentetan peristiwa tersebut secara *de facto and de jure* telah memberi pelajaran penting untuk pengembangan demokratisasi di Indonesia.

Amanat dalam Undang-Undang (UU) tentang Pemerintah Daerah No 32 tahun 2004 yang memuat pelaksanaan model pemilihan langsung kepala daerah. Rakyat secara substansial “merdeka” secara politik dalam menentukan siapa pemimpin daerahnya, dan memiliki kedaulatan penuh untuk mengekspresikan hak-hak politiknya. Kekuasaan rakyat tidak lagi dimanipulasi oleh para anggota DPRD seperti model pemilihan sebelumnya yang memilih bupati atau walikota di dalam institusi parlemen. Esensi pemilihan kepala daerah secara langsung adalah kebebasan politik masyarakat agar lebih mengenal dekat secara figuritas, kapasitas, kapabilitas, serta *track record* pemimpinnya yang akan menjalankan roda pemerintahan di daerahnya dalam 5 tahun ke depan. Dengan demikian, para calon pemimpin haruslah dipilih dari orang yang sudah sangat mengenal daerahnya dan masyarakatnya, serta mempunyai integritas

tinggi<sup>1</sup>.

Paradigma pilkada langsung yang menempatkan rakyat sebagai “raja” dalam prosesnya telah menghadirkan analisis yang menarik tentang prospek demokratisasi di tingkat lokal. Di satu sisi diharapkan aspek-aspek positif muncul, seperti partisipasi masyarakat, kebebasan memilih, akuntabilitas pemerintahan, dan lain-lain. Namun di sisi lain ada aspek negatif yang sangat sulit dihindarkan seperti permainan politik uang (*money politics*), konflik dan kekerasan politik, serta *black campaign* (kampanye hitam) dari tim kampanye dari salah satu kandidat calon pemimpin demi memenangkan pertarungan politik pilkada tersebut.

Dalam hal ini, kembali rakyat menjadi titik sentral, di samping aturan dan elit lokal yang bermain. Ada kekhawatiran bahwa hanya demi kepentingan politik suatu kelompok untuk menguasai posisi-posisi kepala daerah, rakyat yang seharusnya berdaulat untuk memilih kepala daerahnya lalu menjadi korban yang bernama “demokrasi”. Selain tidak menghargai suara rakyat, hal itu juga mengancam keselamatan masyarakat dari kampanye politik, akhirnya bukannya partisipasi politik, namun mobilisasi politik yang justru muncul ke permukaan.

Namun demikian jangan abaikan kehidupan politik masyarakat Indonesia selama 15 tahun terakhir ini be-

---

<sup>1</sup> Purwoko, Bambang. 2005. *Isu-isu Strategis Pilkada Langsung : Ekspresi Kedaulatan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*. Dalam Jurnal Swara Politika, Laboratorium Ilmu Politik FISIP Unsoed. hlm. 4

gitu dinamis, sulit diprediksi dan menjadi tantangan sendiri bagi politisi partai politik untuk mendapatkan dukungan dari pemilih yang semakin rasional dan cerdas terhadap pilihan politiknya. Misalkan saja tentang kemunculan **Golongan Putih (golput)** pasca reformasi, justru semakin meningkat, tidak terkendali dan sulit ditekan menjelang perhelatan pesta demokrasi (pemilu) di semua tingkatan. Apa alasannya, hingga cara untuk menekan angka golput, selalu menarik untuk diperbincangkan.

Satu grup terdaftar di Facebook, jejaring sosial populer itu, dengan nama "*Pemilu Hanya Mengotori Jarimu dengan Tinta yang tak Hilang Seminggu*". Di bagian deskripsi grup, tercantum tulisan yang menyatakan bahwa, "Pemilu juga mengotori pohon, tiang listrik, jembatan, dinding dan tempat lain, dengan gambar wajah mereka yang menjajah ruang pandang. Poster dan banner yang dari Aceh sampai Papua desainnya sama, seperti sama pula isi kepala mereka tentang kekuasaan". Grup yang telah menghimpun anggota, mengkritisi juga bagaimana para calon pemimpin yang ada nampak berusaha keras menggaet konstituen. Lebih lanjut, di badan pesan tertulis, "Ada yang tiba-tiba bersimpati pada petani, nelayan, kaum minoritas, padahal kapan mereka mencelupkan kaki ke sawah. Masih di jejaring Facebook, ada pula grup bertajuk "*Ayo Golput di Pemilu 2009*". Grup yang berlogo kotak surat suara disilang tinta merah bertuliskan "*Pemilu 2009: Jangan Pilih Stok Lama*", itu pun telah diikuti oleh puluhan anggota. Di sana

terpapar pesan bahwa golput merupakan hak setiap warga negara.

Dalam blog yang diketahui milik seorang mahasiswa itu tercantum pernyataan di antaranya, "*Saya bukan penjudi, dan saya tidak mau berjudi dengan memberikan suara kepada orang yang tidak saya kenal*". Baginya, golput bisa dianggap sebagai tamparan bagi praktik demokrasi di negara ini yang sudah berupaya keras menjalankan demokratisasi yang substansial, sebelumnya perpolitikan di Indonesia dinodai oleh sikap kepemimpinan yang otoriter di bawah bayang Soeharto selama 32 tahun.

Dari hal itu, terlihat kenyataan bahwa kampanye golput tidak akan pernah surut, namun sebaliknya cenderung semakin terbuka dan menjadi momok yang mengkhawatirkan bagi politisi untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi politik masyarakat. Pernyataan sikap golput diiringi kritik pedas terhadap carut-marutnya praktik demokrasi, diungkapkan secara gamblang oleh sejumlah kalangan, tak terkecuali mereka yang berusia muda. Kini, ajakan golput tidak hanya melalui aksi jalanan, namun juga dirayakan di dunia maya yang aksesnya lintas ruang dan waktu.

Golput sendiri merupakan fenomena jamak ketika pemilu berlangsung di negara mana pun di dunia. Mungkin sebuah kemustahilan untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam pemilu mencapai 100 persen. Bahkan di Amerika Serikat, negara yang disebut-sebut sebagai kiblat demokrasi itu, golput hampir mencapai 40 persen tiap gelaran pemilu, bahkan sejak

George W Bush Junior mencalonkan diri menjadi presiden kedua kalinya, Golput di negara adidaya tersebut hampir mencapai 50%.

Meski sejatinya golput ialah fenomena alamiah, namun demikian keberadaannya kerap dianggap mengganggu, bahkan perlu dibatasi jumlahnya. Belum lama ini, MUI misalnya, sampai-sampai menyatakan fatwa haram terhadap perilaku golput. Sejumlah pihak menganggap putusan kontroversial itu tidak memiliki relevansi, namun ada juga yang mengapresiasi hal itu sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih. Kenyataannya, golput merupakan sebuah realitas politik yang harus diakui dalam praktik demokrasi di Indonesia. Penyebab golput sendiri ditengarai berkat degradasi kepercayaan terhadap partai peserta pemilu. Sebagian besar masyarakat sudah apatis karena jenuh dengan janji-janji yang minim realisasi. Tidak sedikit pula yang memandang skeptis terhadap kampanye para caleg, di mana mereka terkesan hanya pandai memajang poster, yang justru kerap merusak lingkungan.

Dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Aktivistis Bandung (FAB) berjudul "Memahami Perilaku Calon Pemilih", menelaah berbagai perilaku pemilih, termasuk di dalamnya golput. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat Ferry, mengungkapkan belum banyak referensi penelitian yang membahas *non voting behaviour* atau perilaku tidak memilih tersebut. Mengutip hasil survei oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) atas Pilkada Jakarta

lalu, yang membagi alasan golput ke dalam 3 hal. **Pertama**, alasan teknis, misalnya, orang itu sakit atau memiliki keperluan, sehingga tidak bisa datang ke bilik suara pada hari H sekitar 39%. **Kedua**, alasan administratif, yakni, orang tersebut tidak terdata sebanyak 38%. **Ketiga**, alasan politis, sebut saja, tidak percaya pemilu, tidak ada calon favorit, sebagai bentuk protes atas ketidakberesan birokrasi ternyata hanya sekitar 16%. Sehingga tidak munculnya pemilih ke TPS adalah lebih pada alasan administratif dan teknis, daripada politis. Selain itu, ada catatan menarik soal partisipasi pemilu dari waktu ke waktu. Ferry mengungkapkan, dibandingkan masa lalu, masa reformasi kini justru dihiasi golput lebih tinggi, dan itu menarik untuk dikaji lebih lanjut<sup>2</sup>.

Menurut Ketua KPU Jabar, memilih atau tidak memilih itu adalah hak. "Walau itu hak, tapi ada sedikit kewajiban juga bagi kita untuk turut memilih pemimpin bangsa ini, yang nantinya akan membuat kebijakan publik yang berdampak bagi kita semua." Ke depan, pemilih bisa semakin menjadi *rational voters*, yang berarti mempertimbangkan secara rasional tentang apa untungnya jika memilih seseorang, apa saja program kerjanya. Di sinilah letak penting pencerdasan politik bagi masyarakat, yang juga tidak terlepas dari tanggungjawab parpol. "Jangan ada parpol yang tidak menjalankan fungsi agregasinya, rekrutmennya tidak jelas sehingga menghasilkan orang yang asal, bahkan ada caleg yang tidak tahu

<sup>2</sup> *Golput atau Jadi Pemilih Cerdas*. Diakses pada [cahsolo-ione.blogspot.com](http://cahsolo-ione.blogspot.com) tanggal 15 Maret 2013

nomor urutnya berapa,” kata Ferry.

Sementara itu, Dede Mariana, pengamat politik asal FISIP Universitas Padjajaran, mengungkapkan bahwa paling tidak ada 8 preferensi perilaku pemilih di Indonesia, yakni, primordialisme, ideologi, program, transaksional, peer group, referensi, ikatan emosional, dan pilihan rasional. Menurutnya, kecenderungan perilaku pemilih di Indonesia masih cenderung primordialisme, sedangkan pilihan rasional belum begitu berperan,” kata Dede, yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Publik Lemlit Unpad. Menurut Dede, sosialisasi pemilu terbilang masih kurang dilakukan politisi parpol. Dengan jumlah parpol sebanyak 34 partai, maka kecenderungannya publik menjadi bingung dan tidak mengenal partai baru, sehingga hal inipun yang memunculkan sikap golput di Tanah Air. Ia meyakini, praktik demokrasi akan berjalan benar jika sebagian besar masyarakatnya mendapatkan pendidikan politik yang benar pula. Menurutnya, perlu pendidikan politik yang meluas, demi penguatan *civil society* dan mengasah kritisisme masyarakat. “Sebaiknya *day to day* politik, jangan sosialisasi hanya dilakukan ketika seremonialnya saja” ujarnya<sup>3</sup>.

Bagaimanapun sikap partisipatif tidak melakukan golput berperan dalam menentukan arah nasib bangsa. Salah satunya, dengan penentuan pemimpin yang tepat, yang akan membuat kebijakan publik bagi semua orang. Mereka yang menggu-

nakan hak pilih sebenarnya memiliki sebuah keuntungan, yakni, punya legitimasi untuk menuntut secara hukum, moral, dan politis, pada pemimpin terpilih jika mereka terbukti melanggar janji. Sebaliknya, mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya bisa dibilang tidak punya *privilege* itu. Perilaku pemilih yang unik sewajarnya mendorong partai politik melakukan kampanye dengan penanganan yang berbeda pula. Kuncinya adalah bagaimana tokoh partai menawarkan sesuatu yang baru, yang dapat meyakinkan pemilih yang semakin rasional, dibandingkan dengan pemilih yang cenderung primordialisme, ideologi, program, transaksional, peer group, referensi, ikatan emosional<sup>4</sup>.

Jika kita berkaca pada pemilukada terakhir pada tahun 2013, yakni pemilukada Jawa Barat dan Banyumas, Jawa Tengah sebagai catatan penting fenomena politik saat ini. Dari hasil perhitungan resmi Pemilukada Banyumas 2013 oleh KPU Kabupaten Banyumas. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.315.267 orang, namun hanya sebanyak 871.926 orang saja yang datang dan mencoblos di TPS, sementara 443.341 orang tidak datang ke TPS. Kemudian dari total 871.926 orang yang datang, sebanyak 44.341 orang yang datang ke TPS, diyakini telah merusak kertas suara. Sehingga angka Golput pada pemilukada 2013 dari mereka yang tidak datang ke TPS dan ‘merusak’ surat suara menjadi 487.682 orang (37 persen). Sedangkan suara sah memilih pasangan tertinggi (pemenang) Ir

<sup>3</sup> Perilaku Pemilih Masih Didominasi Primordialisme, Antara News. Jumat 20 Februari 2009. Diakses pada tanggal 15 Maret 2013

<sup>4</sup> Perilaku Pemilih Masih Didominasi Primordialisme, Antara News. Jumat 20 Februari 2009. Diakses pada tanggal 15 Maret 2013

Ahmad Husein-dr Budhi Setyawan hanya sebanyak 368.798<sup>5</sup>.

Kemudian pada pemilukada Jawa Barat (Jabar) yang digelar pada Januari 2013 lalu, tingkat antusiasme dan partisipasi politik warga Jabar dalam Pemilihan Gubernur Jabar 2013 juga menurun dibanding tahun 2008. Angka golput meningkat, dari jumlah 32.536.980 suara dalam DPT hanya 20.713.779 pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau berkisar 63,85 persen dari total pemilih. Sementara pada Pilkada Jabar 2008, angka partisipasi warga tercatat sebesar 67,3 persen (32,6 persen). Sedangkan tahun 2013 naik menjadi 11.823.201 (36,15 persen). Ada penambahan 2.692.597 angka golput pada pilkada Jabar 2013 kemarin. Pernyataan dan pertanyaan yang digaungkan saat ini dari berbagai kalangan, terutama pengamat dan kajian ilmu politik :

Golput lagi.... Golput lagi...! inilah alarm politik yang perlu diseriisi bersama khususnya bagi penyelenggara Pemilu dan kontestan. Pasalnya kehadiran golput seakan ada dan tiada. Ada karena riset-riset politik menunjukkan peningkatan jumlah secara signifikan dan tiada karena golput belum mendapatkan perhatian serius dari para kandidat, tim sukses dan manajer kampanye. Jika demikian halnya akankan golput akan mengganggu 'stabilitas' perpolitikan ditanah air dimasa-masa mendatang, seperti apa postur dan eksistensi mereka.? Tulisan ini mencoba menelaah sisi keunikan golput dengan dinamikanya.

Golput dalam terminologi ilmu politik seringkali disebut dengan *non-voter*. Terminologi ini menunjukkan besaran angka yang dihasilkan dari event pemilu diluar

*voter turn out*. Louis Desipio, Natalie Masuoka dan Christopher Stout (2007) mengkategorikan *Non-Voter* tersebut menjadi tiga ketegori yakni ; **(a) Registered Not Voted** ; yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih dan telah terdaftar namun tidak menggunakan hak pilih, **(b) Citizen not Registered** ; yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak pilih dan **(c) Non Citizen** ; mereka yang dianggap bukan warga negara (penduduk suatu daerah) sehingga tidak memiliki hak pilih<sup>6</sup>.

Arbi Sanit mengidentifikasi bahwa golput adalah mereka secara sadar yang tidak puas dengan keadaan sekarang, karena aturan main demokrasi diinjak-injak partai politik dan juga tidak berfungsinya lembaga demokrasi (parpol) sebagaimana kehendak rakyat dalam sistem demokrasi<sup>7</sup>.

Fenomena Golput di Indonesia sudah muncul pada pemilu 1971 era pemerintahan Soeharto. Kemunculan golput adalah bentuk protes terhadap tirani kekuasaan, dan adanya manipulasi politik pada pemilu yang digelar pemerintah demi memenangkan kembali kekuasaan Soeharto. Bagi Rezim Orde baru golput adalah "virus" ganas yang harus dihadang. Golput bahkan dikategorikan pemerintahan kala itu sebagai bagian dari tindakan makar (subversi) keamanan negara. Padahal tidak ada aturan konstitusi atau undang-undang (UU) Indonesia yang menyatakan memilih sebagai kewajiban.

<sup>6</sup> *Pakar Hukum : Golput : Fenomena Pengabdian Hak Konstitusional Warga Atau ?*. diakses pada situs Pakar-Hukum.blogspot. 15 Maret 2013

<sup>7</sup> Sanit, Arbi. 1985. *Perwakilan Rakyat di Indonesia*. CV Rajawali : Jakarta

<sup>5</sup> Dari berbagai sumber media on line

Gerakan perjuangan golput dimasa pemilu 1971 disimbolkan dengan gerakan segi lima kekosongan yang diusung oleh Arif Budiman dan kawan-kawan.

Pergelaran pemilu di era reformasi yang semakin terbuka, kemunculan angka golput mengalami pergeseran dan orientasi yang semakin terbuka pula. Sikap golput pada periode ini misalnya ditunjukkan oleh Gusdur ketika di 'zhalimi' oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) karena alasan kesehatan tidak dapat mencalonkan menjadi Presiden RI atau sikap yang dilontarkan oleh sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam Ukhuwah (Hidayatullah, Persis, Dewan Mesjid Indonesia, Al Irsyad, Wanita Islam, Persatuan Pelajar Islam, Kahmi, dan Majelis Dakwah) yang tidak akan ikut Pemilihan Presiden putaran ke-2. Saat ini golput sudah merambah pada suksesi politik lokal (pilkada). Golput telah terdesentralisasi seiring dengan desentralisasi politik yang digulirkan awal tahun 2005.

Sementara pada pemerintahan orde baru kehadiran golput dianggap sebagai ancaman. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah mobilisasi pemilih untuk mendatangi TPS, tak jarang intimidasi dan kekerasan mewarnai setiap pemilu ke pemilu. Pada pemilu 1955 (yang demokratis) hingga kekuasaan di bawah pemerintahan Orde Baru persentase angka golput tidak pernah menyentuh angka sepuluh persen. Bedanya pada pemilu 1955, rakyat sangat antusias berpartisipasi dalam politik karena kebutuhannya demi menciptakan pemerintahan, sedangkan pada era Orde Baru rakyat

diintimidasi dan dipaksa untuk mendatangi TPS, terutama bagi kalangan birokrat untuk memilih Golkar sebagai salah satunya parpol bagi PNS.

Kemudian pada pemilu 2004, rakyat yang memiliki hak pilih malah menunjukkan penurunan berpartisipasi, sehingga kemunculan dan puncak peningkatan golput pada era reformasi ini dimulai pada tahun 2004 hingga 2013 sekarang ini. Titik penurunan hak pilih atau peningkatan angka golput terjadi saat demokrasi dan kebebasan sangat terbuka lebar. Pada Pemilu 1999, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput, naik menjadi 7,2 persen dibandingkan Pemilu 1997 yang hanya 6,4 persen saja. Pada pemilu 2004 yang menggelar tiga rangkaian pemilu yang diselenggarakan secara berurutan, sebanyak 16 persen dari pemilih terdaftar tidak menyumbangkan suaranya untuk pemilu legislatif. Kemudian, angka ini mengalami kenaikan menjadi 21,77 persen pada saat pilpres putaran pertama. Pada akhirnya, angka ini kembali mengalami kenaikan pada saat pilpres putaran kedua menjadi 23,37 persen.

Lalu mengapa orang tidak memilih.? Secara teoretis yang dapat menjelaskan hal ini yaitu melalui pendekatan teori-teori perilaku pemilih (*voter behavior*) dan pemahaman sistem kepartaian yang berlaku. Jika penelusuran kita menelisik pada sudut pandang perilaku pemilih maka terdapat beberapa konsep teori yang membantu memecahkan masalah dan mendapatkan jawaban mengapa orang tidak memilih. Be-

berapa teori tersebut bisa berasal dari konsep sosiologis, psikologi. Namun teori-teori politik cukup mendominasi dalam menelaah mengenai permasalahan tersebut. Teori-teori sosial tersebut memang bisa memberi gambaran bagi pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Dari status sosial, teori psikologik memberi penjelasan bahwa kedekatan seseorang dengan partai dan kandidat akan mempengaruhi pilihan-pilihan politiknya sedangkan teori ekonomi politik memberi penjelasan bahwa golput dilakukan melalui pertimbangan-pertimbangan secara rasional. Adapun teori struktur merupakan bagian di luar perilaku pemilih yang berhubungan dengan struktur dan sistem politik yang berlaku, kemudian komunikasi politik pun bisa mendapatkan gambaran dan jawaban untuk memberikan informasi secara ilmiah tentang tipologi dan karakteristik golput.

Menelaah kasus di atas mengenai golput baik pada pemilu-pemilu presiden, legislatif maupun di tingkat lokal pilkada, terbagi pada beberapa alasan mengapa masyarakat memilih golput, dan ada membagi preferensi perilaku pemilih di Indonesia. Sementara pemilih yang bersikap rasional (*rational choice*) masih dikatakan amat sedikit jika dibandingkan dengan perilaku pemilih primordialisme, ideologi atau ikatan emosional. Apakah konsep teori *rational choice* (pilihan rasional) yang dianut dalam konsep ilmu ekonomi, yang juga dipakai dalam dua paradigma ilmu sosial ekonomi-politik bisa membantu menjawab permasalahan ini.

### **Ekonomi Politik Baru ( *The New Political Economy*) pendekatan *Rational Choice* (Pilihan Rasional)**

Ilmu ekonomi relatif berkembang pesat dibandingkan dengan ilmu-ilmu humaniora lainnya. Paling tidak hal itu terlihat dari perkembangan cabang-cabang ilmu ekonomi yang muncul pada saat ini. Cabang-cabang ilmu ekonomi tersebut mengalami perkembangan menjurus ke arah disiplin ilmu yang ketat, cenderung terpisah satu sama lain dan hilang kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial dan politik. Masing-masing berkembang dalam kerangka teori dengan perspektif sendiri-sendiri yang bersifat spesifik<sup>8</sup>.

Perkembangan yang pesat seperti ini pada satu sisi memperlihatkan adanya kemajuan yang khusus dengan berbagai spesialisasi dan konsentrasi disiplin tersendiri. Namun pada sisi lain, spesialisasi yang amat sempit, terpisah dan lepas kaitannya dengan disiplin ilmu lainnya yang menyebabkan disiplin-disiplin ilmu ekonomi tersebut sulit menangkap totalitas kenyataan dan fenomena ekonomi masyarakat yang kian kompleks dan rumit. Fenomena ekonomi tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi berkembang diantara fenomena sosial dan politik secara bersama-sama<sup>9</sup>.

Sebenarnya ilmu ekonomi politik telah diperkenalkan oleh Adam Smith ketika menulis bukunya yang monumental tentang kemakmuran negara. Namun, perkembangannya dari waktu ke waktu

<sup>8</sup> Caporaso, James A dan David P Lavine. 2008. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Penerbit Pustaka Pelajar : Yogyakarta, hlm. 1

<sup>9</sup> *Ibid*.hlm 2

tidak terlalu pesat sebagai ilmu ekonomi politik, melainkan bercabang-cabang menjadi bidang-bidang ilmu tersendiri. Ilmu ekonomi politik bahkan cenderung semakin tertinggal jauh dibandingkan dengan disiplin ilmu-ilmu ekonomi positif lainnya<sup>10</sup>.

Disiplin dan cabang-cabang ilmu ekonomi lainnya berkembang begitu pesat, seperti ilmu ekonomi keuangan, ekonomi perusahaan, ekonomi pembangunan, dan regional. Bahkan, dari pengembangan cabang-cabang ilmu tersebut tumbuh alat-alat analisis matematika yang baru, seperti ekonometrika. Namun, semua cabang dan disiplin ilmu ekonomi tersebut hanya berkaitan dengan dan hanya ada dalam lingkup pengetahuan mengenai mekanisme pasar<sup>11</sup>.

Namun demikian, perkembangan ilmu ekonomi politik menunjukkan gairah dan semangat baru setelah lahir dan tumbuh perspektif teori Ekonomi Politik Baru (EPB) atau *The New Political Economy* dalam decade terakhir ini. Perspektif teori ini kemudian populer dengan sebuta **Rational Choice (RC)** dan **Public Choice (PC)**. Perspektif baru ini berusaha untuk menjembatani ilmu ekonomi yang cang-gih dalam menelaah fenomena ekonomi dalam perspektif mekanisme pasar dengan fenomena-fenomena dan kelembagaan non pasar (*Nonmarket Institution*) pada bidang-bidang di luar ekonomi. EPB ini berbeda

dengan ekonomi politik sejak kemunculannya yang hanya menjangkau fenomena dan kelembagaan ekonomi pasar<sup>12</sup>.

Pendekatan EPB juga berbeda dengan pendekatan ilmu sosial dan politik konvensional, seperti pendekatan konflik terhadap realitas di dalam sistem politik, pendekatan budaya atau pendekatan pluralisme. Ilmu politik tidak mengenal institusi pasar dan sebaliknya, ilmu ekonomi tidak mengenal bagaimana kekuatan politik dan kekuasaan dibangun dan didayagunakan.

Asumsi dasar dari pendekatan pilihan rasional (*rational choice*) ini bahwa manusia pada dasarnya egois, rasional, dan selalu berupaya untuk memaksimalkan utilitas dan keuntungan untuk dirinya. Dalam pandangan ini, individu sebagai aktor diasumsikan mempunyai serangkaian hak milik khusus (*set of properties*), termasuk seperangkat selera atau preferensi tertentu. Karena hak milik tersebut, maka manusia menjadi pelaku ekonomi yang memiliki kapasitas untuk memutuskan secara rasional dalam memilih berbagai alternatif pilihan ekonomi. Cara yang rasional ini juga berlaku untuk pilihan sosial maupun politik. Dengan demikian, pendekatan ini dapat diaplikasikan untuk berbagai fenomena ekonomi maupun sosial politik, seperti sikap pemilih (*voters*) dalam pemilu. Pendekatan pilihan rasional ini bahkan dapat digunakan untuk mempelajari sikap pemerintah dalam proses pengambilan keputusan bagi kebijakan publik.

<sup>10</sup> Mas' oed, Mochtar. 1994. *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

<sup>11</sup> Arifin, Bustanul dan Didik J Rachbini. 2001. *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*. Penerbit Grasindo : Jakarta. hlm. 10

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 11

### **Ilmu Perilaku Ekonomi dan Politik**

Teori pilihan publik juga merupakan teori perilaku yang berguna untuk memahami dan memprediksi perilaku pengusaha, teknokrat, politisi dan perilaku pemilih di dalam sistem ekonomi, politik maupun proses pengambilan keputusan. Dengan teori pilihan publik ini bentuk-bentuk perilaku tersebut dapat dikenali dan diperkirakan sehingga arah proses pengambilan keputusan dapat diduga sebelumnya. Perkiraan dan pemahaman ini dapat digunakan karena teori ini telah berhasil mendayagunakan teori ekonomi neoklasik biasa dimana produsen dan konsumen saling bertukar satu sama lain karena kepentingan yang rasional dari pihak-pihak yang terlibat tadi. Teori pilihan publik tidak berbeda dengan perilaku produsen dan konsumen tersebut karena proses politik pada dasarnya juga pertukaran dua belah pihak dengan basis kepentingan yang rasional. Karena itu, teori pilihan publik sering juga disebut dengan teori pilihan rasional.<sup>13</sup>

Teori pilihan publik merupakan aplikasi atau transformasi teori neoklasik biasa di mana kepentingan individu pelaku di dalam proses pertukaran tersebut dimodelkan dengan dimensi kolektif dalam kelembagaan bukan pasar, seperti pemilu, tawar menawar kolektif pekerja. Perilaku memaksimalkan utilitas juga dipakai sebagai dasar menjelaskan mengapa pertukaran juga terjadi dalam proses politik. Politisi harus memaksimalkan suara dan program untuk masyarakat luas agar pada masa

pemilu dapat dipilih kembali. Sebaliknya pemilih yang mungkin juga memaksimalkan manfaat kolektif kelompoknya dalam menyalurkan aspirasi dan suara.

### **Perkembangan *Public Choice* atau *Rational Choice* dan Aplikasinya**

Atas dasar “kecelakaan” yang terjadi dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial (ekonomi, sosial, dan politik) ini, ada usaha dari sekelompok ekonom untuk melangkah lebih jauh dalam melihat kelembagaan-kelembagaan non pasar dalam kerangka *welfare economics*. Kerangka teori baru ini berusaha melihat fenomena pemerintah sebagai aktor di dalam bidang politik dan ekonomi atau sikap individu dalam memilih wakil-wakilnya di parlemen. Dalam dekade 1980-an, khazanah literature politik, kemudian dipenuhi oleh tulisan-tulisan tentang *rational choice* atau *public choice*. Analogi permintaan dan penawaran komoditi sesuai hukum ekonomi klasik menjadi dasar dan kerangka pemikiran *public choice* dalam merambah bidang-bidang sosial maupun politik. Pemilih dalam hubungan yang lebih demokratis dapat dianggap sebagai konsumen, yang meminta komoditi publik, yang seharusnya disediakan oleh politisi atau pemerintah, yang memenangkan pemilu karena dukungan para pemilih tersebut. Dengan analogi tersebut, pemerintah dapat diasumsikan sebagai *supplier*, yang dapat menyediakan komoditi publik untuk masyarakat. Kedua, *public choice* sangat tertuju perhatiannya terhadap fungsi pilihan sosial (*social choice function*) atau

<sup>13</sup> Arifin, Bustanul dan Rachbini.*op.cit.* hlm 18-19

eksplorasi terhadap kepemilikan kesejahteraan sosial. Analisis *public choice* terarah pada masalah agregasi preferensi individu untuk memaksimalkan fungsi kesejahteraan sosial tadi atau memuaskan seperangkat kriteria normatif. Gambaran dasar dari pendekatan *public choice* adalah penekanan dalam menilai keputusan-keputusan yang rasional, baik oleh individu anggota masyarakat, warga negara maupun keputusan rasional oleh pemerintah<sup>14</sup>.

**Perbandingan Paradigma Ekonomi Klasik dan Pilihan Publik<sup>15</sup>**

Variabel	Ekonomi Klasik	Pilihan Publik
Supplier	Produsen, Pengusaha, Distributor	Politisi, Partai Politik, Birokrasi, Pemerintah
Demandeur	Konsumen	Pemilih ( <i>voters</i> )
Jenis komoditi	Barang Privat	Barang Publik
Jenis Transaksi	Voluntary Transaction	Politics as exchange

Catatan : *Voluntary Transaction* dan *Politics as exchange* agak sukar dibandingkan

Dengan demikian, para ekonom mulai merambah wilayah baru di luar bidang ekonomi dengan perspektif *public choice* sebagai jembatan yang dapat menganalisis masalah-masalah di luar kerangka analisis yang bertumpu pada fenomena pasar. Inilah yang memungkinkan pertemuan kembali bidang ekonomi dan politik dalam suatu wilayah analisis, sehingga perkembangan ilmu-ilmu sosial di masa mendatang tidak lagi tersekat dalam kotak-kotal disiplin

ilmu, yang ketat, saling menafikan dan tidak saling menguatkan satu sama lain. Akibat dari keterpisahaan disiplin ilmu ini, ilmu sosial menghadapi krisis yang besar karena banyak fenomena baru, yang tidak dapat ditangkap secara sempurna oleh kedua kelompok ilmuwan tersebut.

Pendekatan ini dapat berdimensi teoritis, tetapi juga mempunyai preskripsi aplikasi sehingga dapat menjadi referensi kebijakan publik atau bahan yang bermanfaat di dunia akademis. *Public choice* dapat dipakai untuk menunjukkan bagaimana sikap (*behavior*). Yang diintrepetasikan sesuai medium budaya dan ideologi yang ada dan sangat mudah diterangkan sebagai ekspresi dari persepsi individu terhadap kepentingannya. Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk mengiluminasikan kondisi-kondisi keberhasilan tindakan kolektif, dan untuk menunjukkan mengapa lainnya tidak. Dengan demikian, *public choice* dapat menjadi petunjuk bagi pengambil keputusan untuk menentukan pilihan kebijakan yang paling efektif.

Dengan demikian, *public choice* sangat erat kaitannya dengan pemilih, parpol, politisi, birokrat, kelompok kepentingan dan aturan-aturan pemilu. Semua ini biasanya dikaitkan dengan ilmu politik, tetapi pada saat ini para ahli ekonomi politik mengembangkan pendekatan baru yang disebut *public choice* tersebut. Jadi, *public choice* bukan suatu objek studi, melainkan cara untuk menelaah subjek, yang secara definitive diartikan sebagai *the economic study of non market decision making*<sup>16</sup>.

<sup>14</sup> Arifin dan Rachbini.*op.cit.* hlm.18-20

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 20

<sup>16</sup> Arifin dan Levine.*op.cit.* halaman 21

Parpol, pemilih, birokrat, politisi, dan kelompok kepentingan adalah subjek yang menjadi wilayah telaah ilmu politik. *Public choice*, sebagai pendekatan yang menggunakan asumsi-asumsi dasar ilmu ekonomi, mulai berhasil merambah wilayah-wilayah baru ini sehingga kelahiran pendekatan ini dianggap terobosan baru di dalam bidang ilmu-ilmu sosial. Bahkan tokohnya, James Buchanan, mendapat anugerah hadiah Nobel di bidang ekonomi karena berhasil melakukan pendekatan baru ini yang tidak konvensional sebagaimana ahli ilmu ekonomi dan ahli politik umumnya<sup>17</sup>.

Pendekatan ini akhirnya menjadi alat ilmu ekonomi untuk menelaah apa yang dulu menjadi objek telaah ilmu politik. Logika yang diterapkan bersifat penalaran deduktif di mana ahli ilmu ekonomi politik ini menelusuri watak dan sikap aktor-aktor yang rasional (seperti konsumen, pemilih, politisi, dan pengusaha untuk memaksimalkan peluang-peluang yang dimilikinya dalam rangka memenuhi keinginannya. Dari pendekatan ini mereka sebagai aktor rasional dapat mengkonstruksikan sebuah gambaran yang terelaborasi dari suatu ekonomi yang akan terjadi jika setiap individu bertindak rasional. Pengambil keputusan dengan basis teoritis seperti ini dapat membuat prediksi-prediksi yang lebih pasti dan kebijakan-kebijakan yang mempunyai dasar ilmiah dengan jangkauan yang lebih panjang ke depan. Ilustrasi yang dikemukakan lain Mclean, ekonom biasanya hanya bersentuhan dengan pilihan swasta dan

<sup>17</sup> Arifin dan Levine. *op.cit.* hlm. 21

individu. Jika seorang individu menyukai jeruk, tidak perlu keterlibatan pemerintah untuk melakukan kontrol atas suplai jeruk di dalam masyarakat. Teori ekonomi dapat menerangkan dengan jelas bagaimana seorang individu dapat memperoleh jeruk di pasar atas dasar hukum permintaan dan penawaran. Ribuan atau jutaan konsumen dan penjualnya melakukan transaksi secara bebas di pasar, sehingga terbentuk harga sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran tersebut<sup>18</sup>.

Jeruk yang dikonsumsi individu tersebut adalah komoditi ekonomi individual biasa (*private goods*), yang dapat dilihat dalam dua bentuk pandangan yang berbeda. *Pertama*, pemerintah tidak terlibat dan tidak melakukan intervensi pasar jeruk tersebut. Pemerintah mungkin terlibat, tetapi tidak seharusnya melakukan intervensi. *Kedua*, keputusan yang diambil individu untuk membeli jeruk tidak menimbulkan dampak biaya dan keuntungan bagi individu-individu lain di dalam masyarakat<sup>19</sup>.

Hal yang penting dari keterangan ini adalah pembedaan, komoditi ekonomi individu biasa dengan komoditi publik, yang dampaknya berbeda jika kita mengambil tindakan untuk mengkonsumsinya dalam jumlah tertentu. Konsumsi terhadap komoditi publik akan memberikan dampak terhadap individu yang ada di dalamnya, berkaitan dan bersentuhan dengan komoditi tersebut. Dengan demikian setiap keputusan untuk mengkonsumsi komoditi ekonomi individu biasa tidak mempunyai dampak

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm 22

<sup>19</sup> Arifin dan Levine. *op.cit.* hlm. 22

terhadap individu-individu lain. Sebaliknya, setiap pengambilan keputusan untuk mengkonsumsi komoditi publik akan berdampak nyata terhadap individu-individu di dalam masyarakat sehingga sering menuntut peranan pemerintah atau intervensi pemerintah di dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Jika pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan intervensi terhadap pasar yang sudah sempurna di pasar jeruk yang sudah dijelaskan tadi, intervensi tersebut akan menjauhkan keadaan pasar yang sudah baik dan harga yang terbentuk justru tidak ideal karena dibuat secara artificial. Masalah yang bersifat teknis, yang seharusnya diselesaikan di pasar, akhirnya bergeser ke arena politik, yang konsekuensinya akan diterima secara tidak seimbang oleh individu-individu yang seharusnya melakukan transaksi di dalam pasar tersebut<sup>20</sup>.

Fenomena seperti ini akhirnya dapat dikemas dalam kerangka analisis *public choice* karena proses tersebut lebih merupakan keputusan politik ketimbang keputusan ekonomi. Tetapi, analisis yang dapat digunakan adalah alat ekonomi sebagaimana yang terjadi di dalam pengambilan keputusan di dalam transaksi pasar. Dengan demikian, kita dapat melihat politisi sebagai *entrepreneur* atau produsen, yang menawarkan cara terbaik untuk mengkonsumsi komoditi publik, dan masyarakat pemilih sebagai konsumen, yang akan memanfaatkan dan mengkonsumsi komoditi publik tersebut<sup>21</sup>.

*Public choice* adalah penerapan

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 23

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 24

metode-metode ekonomi terhadap bidang politik dengan dua masalah pokok, yakni (a) masalah tindakan kolektif, dan (b) masalah agregasi preferensi. Ilmu ekonomi lahir untuk mengatur atau memberikan arah yang tepat dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi yang langka. Jadi, ilmu ekonomi selalu berkaitan dengan analisis tentang kelangkaan sumber daya. Hal yang sama terjadi untuk politik, suatu seni bagaimana suatu sistem pemerintahan dilaksanakan.

### **Golput Pilihan Rasional dari Proses Demokrasi atau Ancaman Politik**

Memilih adalah hak, dan tidak memilih juga merupakan hak. Kalimat tersebut memang cukup sederhana, namun mempunyai muatan substansi nilai demokrasi yang sangat urgen. Menggunakan hak pilih memang diatur oleh undang-undang, tetapi tidak menggunakan hak pilih tidak secara eksplisit dijelaskan. Tidak menggunakan hak pilih / mencoblos, atau biasa disebut golput. Memang masih banyak diperdebatkan pada tataran konsep. Namun pengakuan terhadap fenomena tersebut seakan mengeliminir perdebatan tentang apa yang disebut dengan golput.

Pembicaraan mengenai golput nyaris tidak pernah lepas dari setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia maupun di negara yang sudah maju demokrasinya. Sejak pertama kali dideklarasikan oleh Arief Budiman menjelang pemilu 1971, golput menjadi istilah ngepop yang selalu muncul saat berlangsungnya pemilu. Munculnya golput sebagai reaksi dan sikap

kritis dari kebijakan politik penguasa Orde Baru tentang penyelenggaraan pemilu. Kelompok golput menilai, pemilu yang pertama kali dilaksanakan di era Orde Baru tersebut sudah direkayasa oleh Golkar dan ABRI sebagai pendukung utamanya, guna memenangkan pertarungan politik selama mungkin di Indonesia<sup>22</sup>.

Golput dalam penyelenggaraan pemilu adalah hal yang wajar. Asumsi golput yang paling gampang adalah diambil dari jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dengan prediksi itu, maka pemilu eksekutif pada 5 juli lalu memang telah menorehkan catatan tersendiri. Untuk pertama kalinya, sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, jumlah golput mencapai lebih dari 20 persen. Padahal, sejak pemilu 1971 hingga rezim otoriter Orde Baru berakhir, jumlah golput hanya berkisar sekitar 10 persen saja<sup>23</sup>.

Menurut Ramlan Surbakti, asumsi tersebut masih bisa diperdebatkan, yang menegaskan bahwa pemilih terdaftar yang tidak menggunakan haknya tidak bisa serta merta dikelompokkan sebagai golput. Golput hanyalah mereka yang memang sengaja tidak mau menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara atau sengaja merusak suaranya. Golput harus dilakukan sebagai sebuah kesadaran politik. Dengan pengkategorian seperti ini, tentu lebih sulit menelaah seberapa banyak pemilih yang

secara sadar memilih menjadi golput. Dengan demikian, penghitungan mengenai jumlah golput riil pun akan semakin sulit dilakukan<sup>24</sup>.

Banyak hal yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi. Dalam konteks pilkada di beberapa daerah, kemungkinan golput disebabkan oleh: *Pertama*, Banyaknya perantau yang tidak bisa pulang di berbagai daerah ketika ada jadwal pemilu dilakukan, sehingga banyak dari warga yang bekerja di luar kota malas untuk meninggalkan pekerjaannya; *Kedua*, Kejenuhan dari rutinitas mencoblos dalam pemilu, kecenderungan terjadinya penggelembungan pemilih golput bisa terkondisikan mengingat rangkaian acara politik terlalu padat sepanjang tahun. Situasi ini membuat publik jenuh dan memilih melakukan aktivitas rutinnnya; *Ketiga*, Tidak mau menggunakan hak pilihnya, warga yang secara sadar tidak mau menggunakan hak pilihnya memang tidak bisa dikaji secara kualitatif, namun secara riil mereka tidak menggunakan haknya.

Faktor lokal lain seperti mobilitas masyarakat di kota besar dan buruknya cuaca pada sejumlah tempat, juga sempat disebut sebagai penyebab penurunan tingkat partisipasi itu. Di samping itu, ketidakpedulian masyarakat terhadap keberlangsungan pemilu ditenggarai sebagai salah satu faktor signifikan dalam pilkada. Bisa juga disebabkan oleh sosialisasi yang tidak tuntas atau mengenai sasaran. Sementara Koordinator

<sup>22</sup> *Golput Haram, Tuhan Pun Tertawa*. dalam situs tukangngarang.wordpress.com. diunggah pada 12-12-2008. Diakses pada tanggal 15 Maret 2013.

<sup>23</sup> Budiman, Arif. *Golput, Gejala dan Masa Depan*. Dalam situs golputgolput.blogspot.com. diakses pada tanggal 15 Maret 2013

<sup>24</sup> *Pilkada dan Peluang Golput*. Mohammad Ali Andrias. Diunggah pada tanggal 9 Oktober 2011. Dan diakses pada tanggal 15 Maret 2013

Bidang Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Didik Supriyanto bersikukuh bahwa salah satu penyebab naiknya golput adalah daftar pemilih yang tidak “bersih”. Artinya masih ada pemilih yang tidak dikenal atau yang semestinya tidak berhak memilih, tetapi tercantum dalam daftar pemilih. Pertambahan jumlah penduduk pemilih pun, menurut Didik, pantas diragukan<sup>25</sup>.

Pada saat pengumuman penetapan hasil pemilu legislatif pada 5 Mei 2004 lalu, KPU sudah menyebutkan mengenai sejumlah faktor yang menyebabkan tingginya jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan haknya faktor-faktor itu adalah<sup>26</sup>: *Pertama*, Adanya pemilih yang terdaftar lebih dari sekali di tempat yang berbeda, terdaftar lebih dari sekali di tempat yang sama; *Kedua*, Adanya kartu pemilih yang tidak dapat dibagikan karena pemiliknya tidak dikenal; *Ketiga*, Adanya warga yang belum berhak memilih tetapi diberi kartu pemilih; *Keempat*, Adanya pemilih yang meninggal dunia; *Kelima*, Adanya pemilih terdaftar yang tidak menerima kartu pemilih; *Keenam*, Tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS), dan; *Ketujuh*, Pemilih yang memang sengaja tidak menggunakan haknya.

Faktor-faktor tersebut merupakan sebab-sebab yang ada dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, tidak terkecuali dalam pilkada. Tidak ada pembedahan secara rinci dan kuantitatif atas ke-

tujuh faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat partisipasi pemilih itu.

Namun, selain beberapa hal di atas, banyak ahli yang melihat fenomena golput sebagai model hubungan elit-massa yang tidak harmonis. Ada yang melihat golput terjadi karena rakyat merasa kurang dihargai oleh parpol, yang mengusung calon pemimpin dalam pilkada. Ini didasari oleh anggapan bahwa penyelenggaraan pilkada hanya bersifat prosedural. Demokrasi yang terjadipun, demokrasi prosedural. Secara substansial bukan untuk pemberdayaan dan pendidikan politik rakyat, tetapi hanya dimanfaatkan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, dimana orientasinya hanyalah status sosial, ekonomi dan politik.

Sedangkan Riswandha Imawan menilai, golput adalah keputusan rasional untuk memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara preferensi kelompok elit politik dengan publiknya di bawah. Kelompok elit tidak perlu alergi dengan kelompok ini, fenomena golput semestinya dianggap sebagai bagian dari koreksi sosial. Pilihan untuk menekan golput berada di tangan para elit dengan kesadaran mereka untuk mendeteksi dan mengakomodasikan keinginan yang tumbuh di lapisan sebab dasar dalam politik adalah *trust* (kepercayaan)<sup>27</sup>.

Riswandha juga mengutip sebagian kalangan yang berpijak pada etika dan moralitas politik yang berpandangan bahwa

<sup>25</sup> Jumlah Golput Melambung. Diakses pada situs [www.yipd.or.id](http://www.yipd.or.id) pada tanggal 15 Maret 2013

<sup>26</sup> Lihat di situs [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

<sup>27</sup> Asgart, Sofian Munawar. *Dilema Mekanisme Perwakilan : Fenomena Golput dalam Pemilu 2009 dan Model Representasi Alternatif*. Diakses pada politik.kompasiana.com pada tanggal 15 Maret 2013

pilihan untuk mencoblos seperti kepemilikan saham. Bagi kelompok ini, ibaratnya pemilik modal, mereka yang tidak terlibat dalam proses tentunya tidak punya hak untuk ikut mengubah proses yang tengah berlangsung. Hanya saja, Riswandha menyayangkan jika menjadi golput menjadi pilihan emosional, apalagi jika langkah itu justru dilakukan kelompok masyarakat yang berpendidikan. Politik tidak bisa dilihat sekedar sebagai proses membagi-bagi kursi kekuasaan.

Sementara menurut Komaruddin Hidayat, fenomena golput harus dilihat sebagai bagian ketika ada sekelompok orang ingin member catatan bahwa mereka yang sedang berkompetisi saat ini *not fully ok*. Secara moral, peringatan seperti itu wajar saja dilakukan. Yang dilarang dalam undang-undang hanya mereka yang secara sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan menggunakan hak pilihnya<sup>28</sup>.

### **Golput dan Partisipasi Politik dalam Pilkada**

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu pada masa rezim Soeharto di atas 85%, bahkan pernah menembus angka 90%, sedangkan angka yang tidak melakukan partisipasi hanya berkisar 15% saja. Dalam ranah demokrasi, angka kisaran tersebut masuk dalam kategori partisipasi yang tinggi. Namun secara riil politik, di masa Orde Baru, yang terjadi bukanlah partisipasi politik dengan 'kesadaran', tetapi

adanya mobilisasi politik. Sedangkan dalam pilkada langsung tahun 2005, jumlah pemilih yang menggunakan haknya mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan pemilu di masa Orde Baru.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi), orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan dan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya<sup>29</sup>.

Miriam Budiardjo mengemukakan definisi umum dari partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Aktivitas ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, sehingga partisipasi memilih merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang paling sering dan mudah untuk dilihat terutama dalam negara-negara demokratis<sup>30</sup>.

<sup>29</sup> Surbakti, Ramlan. 1995. *Memahami Ilmu Politik*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta. hlm.40

<sup>30</sup> Budiardjo, Miriam. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Penerbit Yayasan Obor Indonesia : Jakarta. hlm. 2.

<sup>28</sup> Asgart. Sofian Munawar. *Loc.Cit*

Hal yang mendasari partisipasi politik adalah kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk kepemimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang abash oleh rakyat. Masyarakat berpartisipasi dalam proses politik melalui pemberian suara karena terdorong oleh keyakinan bahwa dengan berpartisipasi kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai implikasi<sup>31</sup>.

Dalam konteks demokrasi umumnya dianggap bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat, menunjukkan warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik tersebut. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena diartikan bahwa banyak warga negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan, kemudian dianggap pemimpin terpilih akan kurang tanggap atas aspirasi masyarakat dan pemimpin yang terpilih akan mengalami krisis legitimasi dalam menjalankan pemerintahannya nanti, sehingga cenderung untuk

<sup>31</sup> Budiarjo. *Op.cit.* hlm.2

melayani kepentingan beberapa kelompok saja.

Partisipasi sebagai kegiatan dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Masuk dalam kategori partisipasi ialah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakam, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, kegiatan yang masuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan yang mentaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Dengan kata lain, partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses *input* dan *output* politik, sedangkan partisipasi aktif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses *output*<sup>32</sup>.

Di samping itu, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori aktif maupun pasif karena mereka menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Kelompok ini disebut apatis atau golongan putih (golput). Dalam bahasa Milbarth dan Goel dikategorikan sebagai berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Dalam bahasa Jeffri M. Paige, partisipasi pasif tertekan, kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah. Tidak semua warga negara ikut dalam proses politik, walaupun di dalam sistem politik demokrasi, partisipasi politik merupakan hak warga negara. Pertanyaan

<sup>32</sup> Surbakti.*op.cit.*hlm 142

yang kemudian muncul, mengapa seseorang berpartisipasi atau kurang berpartisipasi dalam proses politik? Secara garis besar ada dua hal yakni kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah, yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang mengenai lingkungan masyarakat dan politik dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah, apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak?<sup>33</sup>

Dalam konteks inilah, rendahnya partisipasi politik rakyat dalam pemilu selalu menarik dikaji, karena hal tersebut terkait dengan legitimasi “penguasa” baru sebagai pemimpin dan penyelenggara pemerintahan. Pada pemilu 1999, persentase *voter turn out* (pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilihnya) menurun dari 92% pada pemilu 1999 menjadi 84% pada pemilu legislatif 2004. Kecenderungan sama juga terjadi pada pemilu presiden yang lalu, bahwa *voter turn out* hanya berkisar pada angka 76%.

Dalam pilkada, rata-rata angka partisipasi rakyat yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 20-30%. Misalnya hasil dari Kabupaten Kukar 29,3%, Pekalongan 32%, Kebumen 28,2%, Cilegon 23,7%, Bangka Tengah 41%, Bangka Selatan 30%, dan Bangka Barat 32%, Purbalingga 27,5%,

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 143-144

bahkan di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sekitar 50% pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap tidak melaksanakan haknya, terakhir pilkada di Jawa Barat dan Banyumas angka golput sekitar 30-35%. Angka-angka tersebut menyisakan pertanyaan. Mengapa angka warga yang tidak menggunakan hak pilihnya tinggi. Dan ini menjadi jawaban kita bersama bagi ilmuwan politik, terutama praktisi politik atau parpol untuk mengurangi angka golput. Jawabannya hanya pada masyarakat, berikan mereka kebijakan politik yang populis sesuai dengan kebutuhannya, dengarkan aspirasi mereka. Ciptakan lingkungan bebas korupsi disemua institusi pemerintahan.

### **Simpulan**

Memang harus diakui bahwa kita belum bisa mengidentifikasi secara jelas, apakah golput dilakukan secara sadar maupun tidak. Dari data-data kasus diberbagai momen pemilu hingga pilkada, data golput didapat bersamaan dengan kesalahan pendataan pemilih, yang bersifat teknis administratif. Namun angka-angka tersebut menyadarkan kita bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan, bahwa pemimpin dalam menjalankan pemerintahan haruslah mendapat legitimasi dari yang dipimpin.

Kita tidak bisa mengkategorikan golput yang terjadi dalam rentetan pilkada di Indonesia mutlak dalam asumsi Paige, Milbarth dan Goel. Dalam konteks perilaku memilih di Indonesia angka golput dapat bersumber dari kesalahan teknis administratif dan kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang rendah.

Diakui atau tidak masih diperdebatkan atau tidak, dan dilakukan secara sadar atau tidak, angka-angka warga yang tidak menggunakan hak pilih maupun suara tidak sah adalah bentuk partisipasi politik. Dalam konteks tersebut, mereka yang “masuk” dalam golput masih mempunyai hak yang sama untuk mempengaruhi dan berpartisipasi terhadap jalannya proses pemerintahan di daerah masing-masing hingga ada pilkada kembali.

### Daftar Pustaka

- Arfin, Bustanul dan Didik J Rachbini. 2001. *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 1998. Edisi revisi, *Partisipasi dan Partai Politik*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Caporaso, James A dan David P Lavine. 2008. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Penerbit Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Khoiruddin, 2004, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi (Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Maliki, Zainuddin (editor), 2001. *Demokrasi Tersandera*. Yogyakarta :Galang Press.
- Mas' oed, Mochtar. 1994. *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sanit, Arbi. 1985. *Perwakilan Rakyat di Indonesia*. CV Rajawali : Jakarta
- Surbakti, Ramlan.1992. *Memahami Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Purwoko, Bambang.2005. *Isu-isu Strategis Pilkada Langsung : Ekspresi Kedaulatan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*. Dalam Jurnal Swara Politika, Laboratorium Ilmu Politik FISIP Unsoed.
- Putra, Fadillah. 2001, *Devolusi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rachbini, Didik J. 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Aveross Press.
- \_\_\_\_\_, 1996. *Perspektif Ekonomi Politik Baru*. CIDES : Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Diagnosa Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- \_\_\_\_\_.2006. *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik*. Ghalia Indonesia: Bogor.

### Sumber lain :

Asgart, Sofian Munawar. *Dilema Mekanisme Perwakilan : Fenomena Golput dalam Pemilu 2009 dan Model Represntasi Alternatif*. Diakses pada politik.kompasiana.com pada tanggal 15 Maret 2013

Budiman, Arif. *Golput, Gejala dan Masa Depan*. Dalam situs golput-golput.blogspot.com. diakses pada tanggal 15 Maret 2013

*Golput Haram, Tuhan Pun Tertawa*. dalam situs tukangngarang.wordpress.com. diunggah pada 12-12-2008. Diakses pada tanggal 15 Maret 2013.

*Golput atau Jadi Pemilih Cerdas*. Diakses pada [cahsolo-ione.blogspot.com](http://cahsolo-ione.blogspot.com) tanggal 15 Maret 2013

“*Hasil PEMILU 2009: Partai Golput Menjadi Pemenang*”, dalam *Nusantara-raku.Com*. 10 April 2009. Diakses pada tanggal 15 Maret 2013

*Pilkada dan Peluang Golput*. Mohammad Ali Andrias. Diunggah pada tanggal 9 Oktober 2011. Dan diakses pada tanggal 15 Maret 2013

*Jumlah Golput Melambung*. Diakses pada situs [www.yipd.or.id](http://www.yipd.or.id) pada tanggal 15 Maret 2013

*Pakar Hukum : Golput : Fenomena Pengabdian Hak Konstitusional Warga Atau ?*. diakses pada situs *Pakar-Hukum.blogspot*. 15 Maret 2013

“*Perilaku pemilih Parpol Tak Beri Harapan, Golput Naik*”, dalam *Kompas*, 28 Juli 2008. Diakses pada tanggal 15 Maret 2013

*Perilaku Pemilih Masih Didominasi Primitifisme*, *Antara News*. Jumat 20 Februari 2009. Diakses pada tanggal 15 Maret 2013

[www.kpu.co.id](http://www.kpu.co.id)